

Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran

Adhi Iman Sulaiman, Toto Sugito, Ahmad Sabiq

Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Prof. dr. HR. Boenyamin No. 993 Purwokerto 53211

Email: adhi.2005unsoed@gmail.com

Abstract: *The profession of migrant worker in rural communities remains as the most promising job for better welfare. Participatory Rural Appraisal is used as the method, meanwhile the data is collected through FGD, interviews, observation, and documentation. The informants are former and potential migran workers in Sidaurip and Karangtawang village of Cilacap district. Using interactive analysis and SWOT, the results show that participatory development communication is important in planning and implementing empowerment program, to get the people involved to develop their village, including to choose to stay in the village instead of become migran worker as the most important profession.*

Keywords: *empowering, migrant workers, participative communication, rural communities*

Abstrak: *Profesi buruh migran bagi masyarakat desa tetap menjadi harapan utama paling menjanjikan dan menjamin kesejahteraan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan Participatory Rural Appraisal dan pengumpulan data melalui FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian menggunakan purposif sampling yaitu mantan dan calon buruh migran di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang Kabupaten Cilacap. Menggunakan Analisis interaktif dan SWOT, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa, sehingga masyarakat terlibat dalam membangun desa, mendapat pekerjaan, kesejahteraan, dan tidak meninggalkan desa untuk menjadi buruh migran sebagai profesi paling utama.*

Kata Kunci: *buruh migran, komunikasi partisipatif, masyarakat desa, pemberdayaan*

Pembangunan desa menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah dan nasional karena desa memiliki sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Menurut Adisasmita (2006, h. 3-4), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Adi (2013, h. 201) berpendapat bahwa pembangunan di Indonesia akan kurang memiliki arti bila tidak dilakukan di desa karena masih cukup

banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal.

Terdapat slogan yang menjadi semangat pembangunan di Jawa Tengah, yaitu “Bali Deso Bangun Deso”. Artinya, kembali ke desa dan membangun desa. Desa adalah kampung halaman yang dicintai dan dirindukan oleh masyarakatnya, khususnya yang sedang marantau meninggalkan desa untuk mencari nafkah, seperti menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dianggap menjadi profesi

paling menjanjikan dan prospektif untuk mendapat kesejahteraan.

Namun, problematika buruh migran terjadi mulai dari proses keberangkatan, ketika bekerja, dan setelah kembali ke tempat asal di kampung halaman. Kasus-kasus seperti status kerja yang ilegal, tuduhan dan hukuman berat atas pencurian serta pembunuhan, perlakuan kekerasan fisik, mental, termasuk seksual -terutama yang dialami oleh buruh migran perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW)- banyak terjadi. Berdasarkan *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) tahun 2010, proses migrasi para perempuan buruh migran mengalami beberapa perlakuan yang melanggar hak, antara lain potongan gaji, gaji di bawah standar (*underpay*), tingginya jam kerja dan beban pekerjaan, gaji tidak dibayar, paspor ditahan, dan batasan berkomunikasi dan bersosialisasi.

Catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2015 merekam banyak masalah dan kasus terkait TKI. Kasus TKI ingin dipulangkan ke Indonesia 3.205 kasus. Kasus gaji TKI tidak dibayar majikan 3.189 kasus. TKI putus hubungan komunikasi 2.676 kasus. Pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja (PK) 1.633 kasus. TKI meninggal dunia di negara tujuan 1.574 kasus. TKI mengalami tindak kekerasan dari majikan 718 kasus. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak 458 kasus. TKI gagal berangkat 401 kasus. Kasus TKI dalam tahanan atau proses tahanan 307 kasus. TKI tidak berdokumen 258 kasus.

Penahanan paspor atau dokumen lainnya 236 kasus. TKI lari dari majikan 212 kasus. Pelecehan seksual pada TKI 201 kasus.

Pada tahun 2016, dari sumber yang sama, tercatat 78 jenis permasalahan yang diadakan. Mulai dari TKI ingin dipulangkan (3.850 kasus), gaji tidak dibayar (3.826 kasus), putus hubungan komunikasi (3.038 kasus), meninggal di negara penempatan (2.391 kasus), pekerjaan tak sesuai kontrak (1.866 kasus), tindak kekerasan dari majikan (857 kasus), hingga melarikan diri dari majikan (60 kasus).

Selama 2013-2014 sedikitnya ada 6.364 kasus TKI bermasalah. Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Migrant Care* menyebut ada 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri (DPR, 2015). Menurut Sumardiani (2014, h. 254) kemiskinan menjadi faktor dominan yang menjadi pendorong warga Indonesia untuk memilih bekerja ke luar negeri sebagai TKI yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup dan keluarganya, karena banyak sekali permasalahan yang dialami TKI.

Oleh karena itu, sudah seharusnya buruh migran mendapat perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, wakil rakyat, pihak swasta, dan lembaga-lembaga *civil society* mulai tingkat pusat sampai tingkat lokal (desa), termasuk akademikus atau perguruan tinggi. Subianto (2006, h. 173) menuturkan diperlukannya campur tangan pemerintah, terutama dalam menumbuhkan *entrepreneurship*, agar pemanfaatan pendapatan dari buruh migran

yang dikirimkan ke desa, selama pelaku mobilitas tidak berada di desa (remitan), dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan investasi, bukan konsumtif.

Meskipun telah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran, namun dalam pelaksanaannya di daerah belum banyak didukung oleh kebijakan lokal yang dapat dijadikan pijakan bagi program dan kegiatan yang bersifat lokal. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah diperlukan, khususnya dalam membuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal (Sutaat, Setiti, Widodo & Unayah, 2011, h. 98-99).

Desa seharusnya menjadi rumah tinggal sekaligus tempat penghidupan yang membuat betah, aman, nyaman, menjamin kesejahteraan masyarakat, dan melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembangunan partisipatif adalah proses pelibatan masyarakat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Menurut Rangkuti (2011, h. 33) paradigma pembangunan mengalami perubahan, yaitu menitikberatkan pada pemberdayaan yang dikenal dengan pembangunan manusia, pembangunan berbasis sumber daya lokal, dan pembangunan kelembagaan.

Perwujudan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1 Ayat 8, yakni bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 78 Ayat 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada Ayat 3, pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraspirasi, berdialog, dan bermusyawarah dengan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dalam pembangunan. Menurut Indardi (2016, h. 76), aspek komunikasi dipercaya sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Mulyana (2007, h. v) menjelaskan bahwa komunikasi dalam pembangunan harus berorientasi kerakyatan atau humanistik, yaitu menuntut dialog antara pihak-pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan, yaitu rakyat dan pemerintah. Hal ini didukung oleh Hanuranto (2011, h. 3) yang menuturkan

bahwa peningkatan akses komunikasi dan informasi memberikan pengaruh langsung pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi.

Masyarakat yang meninggalkan desa dengan segala potensinya untuk mencari pekerjaan dan kesejahteraan ke luar negeri sebagai buruh migran atau TKI, menjadi ketertarikan penulis meneliti dari segi komunikasi pembangunan di desa. Tujuan penelitian yaitu merancang komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan buruh migran (mantan dan calon) di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, dan Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sebagai pusat buruh migran terbesar di Jawa Tengah.

Proses reorientasi yang diperlukan bagi penelitian komunikasi diharapkan dapat menggunakan kekuatan komunikasi untuk tujuan-tujuan yang lebih manusiawi (Rogers, 1985, h. 10). Komunikasi dapat dijadikan tradisi penelitian untuk memecahkan permasalahan dan menghasilkan produk atau temuan yang memberikan kontribusi dalam pengembangan komunikasi pembangunan (Melkote, 1991, h. 19).

METODE

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah pendekatan penelitian partisipatif yang memfasilitasi proses saling berbagi informasi dengan menggunakan pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk menilai, menganalisis, dan merencanakan sendiri apa yang

dibutuhkan masyarakat (Syahyuti, 2006, h. 143).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu (1) Mulai dari studi pendahuluan dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan data, menganalisis suatu daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian, pembukaan akses atau pendekatan, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian, dan desain penelitian, (2) Ketika proses pelaksanaan sebelum dan sesudah FGD, dan (3) Pada saat melakukan verifikasi data dan triangulasi hasil penelitian.

Lokasi penelitian di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, dan Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan sebagai daerah pengirim terbesar buruh migran di Jawa Tengah. Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu para buruh migran (calon dan mantan) sebagai kelompok pekerja (*community worker*) yang akan menjadi pionir bagi pelaku pembangunan dan agen perubahan di masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (2007, h. 19-20), yaitu, *pertama*, reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan klasifikasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. *Kedua*, penyajian data, adalah kumpulan informasi yang

tersusun, dilakukan penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan, kemudian didukung analisis SWOT untuk melakukan proses identifikasi masalah, potensi, dampak, dan hasil, meliputi (1) Faktor internal yang terdiri dari *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), (2) Faktor eksternal terdiri dari *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) (Adisasmita, 2006, h. 89-90). *Ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif mulai dari mencari, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang utuh, lalu kesimpulan diverifikasi selama penelitian.

HASIL

Deskripsi singkat luas wilayah dan penduduk di dua lokasi penelitian menurut data monografi dari pemerintahan desa tahun 2014/2015, yaitu Desa Sidauri, Kecamatan Binangun, memiliki luas wilayah 460 Ha, jumlah penduduk 5.658 jiwa terdiri dari laki-laki 2.914 orang (51,5%) dan perempuan 2.744 orang (48,5%). Tingkat pendidikan umumnya Sekolah Dasar 2.770 orang (49%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 762 orang (13,5%), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 520 orang (9,2%), diploma 190 orang (3,4%), dan sarjana 81 orang (1,4%). Penduduk umumnya sebagai petani dan buruh tani 2.854 orang (50,4%) dan buruh migran sebanyak 1.454 orang (25,7%).

Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, memiliki luas wilayah 447 Ha dengan jumlah penduduk 6.152 jiwa terdiri dari laki-laki 3.031 orang (49,3%) dan 3.121 orang (50,7%). Penduduk

umumnya menjadi karyawan swasta 1.612 orang (26,2%), petani dan buruh tani 1.403 orang (22,8%), pedagang atau berwiraswasta 1.272 orang (20,7%), serta buruh migran 1.496 orang (24,3%). Tingkat pendidikan umumnya SD 2.431 orang (39,5%), SMP 2.114 orang (34,4%), SMA 1.221 orang (19,8%), diploma 102 orang (1,7%) dan sarjana 72 orang (1,2%). Berdasarkan data penduduk di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang memiliki kesamaan karakteristik dari tingkat pendidikan umumnya SD dan SMP, kemudian mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani serta menjadi buruh migran.

Deskripsi profil informan penelitian, yaitu para mantan buruh migran, disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 tentang profil informan sebagai mantan buruh migran umumnya berusia produktif antara 27-50 tahun, tingkat pendidikan umumnya SD dan SMP. Bekerja menjadi buruh migran di Singapura, Taiwan, Hongkong, dan mayoritas di Malaysia. Lama bekerja umumnya 2-10 tahun, ada yang masih berminat dan ada yang tidak lagi berminat menjadi buruh migran. Biro penyalur tenaga kerja ada yang disebutkan legal, ada yang lupa dan tidak mau menyebutkan, serta ada yang berani menyatakan ilegal.

Di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang, menjadi buruh migran adalah tuntutan dan kebutuhan dengan dorongan terbesar dari saran atau ajakan keluarga dan teman yang sedang atau telah menjadi buruh migran, kemudian tawaran dari penyalur tenaga kerja. Motif menjadi buruh migran yaitu mencari pekerjaan dengan penghasilan

Tabel 1 Profil Informan Penelitian Mantan Buruh Migran di Desa Sidaurip

Nama Responden	Usia	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Negara Tempat Migran Bekerja	Lama Menjadi Buruh Migran	Minat menjadi Buruh Migran	Biro Penyalur Tenaga kerja
Turisem	46	L	SD	Singapura	2 tahun	Masih berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Tusno	39	L	SMP	Malaysia	6 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Warsiyem	37	P	SLTP	Hongkong	4 tahun	Masih berminat	PT. Phonex Sinar Jaya
Jaenudin Azwar	48	L	SLTP	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	Perorangan
Suparmi	48	P	SMP	Taiwan	3 tahun	Masih berminat	PT. Antar Tenaga Mandiri
Jumini	41	P	SMP	Taiwan	3 tahun	Tidak berminat	PT. Antar Tenaga Mandiri
Sutini	44	P	SMP	Taiwan	3 tahun	Masih berminat	PT. Yonasindo
Radiman	33	L	SMP	Malaysia	5 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Suripto	41	L	SLTA	Malaysia	4 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Aris	50	L	SMP	Malaysia	3 tahun	Tidak berminat	Perorangan
Watim	40	L	SD	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	PT. Narsum
Subejo	42	L	SLTP	Malaysia	10 tahun	Tidak berminat	Ilegal
Sunarko	46	L	SLTA	Malaysia	2 tahun	Masih berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Trisna Ariwati	35	P	SLTA	Singapura	10 tahun	Masih berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Nuryanto	59	L	SLTP	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	Ilegal
Narsan	54	L	SMP	Malaysia	5 tahun	Tidak berminat	Ilegal
Sunardi	49	L	SLTA	Malaysia	3 tahun	Tidak berminat	Ilegal
Suparman	47	L	SLTA	Malaysia	3 tahun	Tidak berminat	Ilegal

Sumber: Data primer

Tabel 2 Profil Informan Penelitian Mantan Buruh Migran di Desa Karangtawang

Nama Responden	Usia	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Negara Tempat Migran Bekerja	Lama Menjadi Buruh Migran	Minat menjadi Buruh Migran	Biro Penyalur Tenaga kerja
Tarsan	43	L	SLTA	Taiwan	7 tahun	Tidak berminat	PT. Java Espress utama
Daimun	44	L	SD	Malaysia	8 tahun	Tidak berminat	Ilegal
Sawito	47	L	SD	Malaysia	6 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Suwarno	42	L	SLTP	Malaysia	9 tahun	Masih berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Misno	28	L	SD	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	Legal
Bolot Kasyanto	42	L	SD	Malaysia	3 bulan	Tidak berminat	PT. Panca Mega Bintang

Misem	41	P	SD	Singapura	4 tahun	Masih	PT. Yonasindo
Sutari	41	P	SMP	Malaysia	5 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Marsono	44	L	SD	Malaysia	7 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Lasimun	48	L	SLTA	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	Illegal
Sunanto	52	L	SD	Malaysia	8 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Kiran Karwedi	45	L	SLTA	Malaysia	12 tahun	Tidak berminat	Bp. Jupri
Wasimin	40	L	SD	Malaysia	9 tahun	Masih berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Sulistri	34	P	SMU	Taiwan	3 tahun	Masih berminat	PT. Sanjaya
Darmi	34	P	SLTA	Taiwan	3 tahun	Masih berminat	PT. Putra Jabung Perkasa
Suparmii	44	P	MI	Singapura	9 tahun	Tidak berminat	PT. Jasa Raharja Surabaya
Pasiyem Paryanti	43	P	SLTP	Hongkong	10 tahun	Masih berminat	Transiwi Tangerang
Sumarti	27	P	SMP	Hongkong	2 tahun	Masih berminat	PT. Antar Bintang Permai
Dariyah	31	P	SD	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	PT.
Rita Susanti	26	P	SD	Malaysia	3 tahun	Masih berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Diman	51	L	SD	Malaysia	2 tahun	Tidak berminat	PT. Intan
Satimin	34	L	SMP	Malaysia	5 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Kasmin	51	L	SMP	Malaysia	4 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan
Mulud	31	L	SMK	Malaysia	4 tahun	Tidak berminat	Lupa/tidak menyebutkan

Sumber: Data primer

yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan menabung untuk modal usaha di desa dengan target waktu bekerja antara 2-5 tahun. Negara yang menjadi tujuan umumnya adalah Malaysia dengan profesi sebagai buruh tani, peternak, nelayan, dan pembantu rumah tangga, lalu diikuti Singapura, Arab Saudi, dan Hongkong dengan menjadi pembantu rumah tangga, Korea dan Taiwan menjadi buruh industri elektronik.

Bagi masyarakat di kedua desa tersebut, ukuran sukses menjadi buruh migran adalah

jika dapat menabung dan membeli tanah, sawah, ladang, membangun rumah, serta modal kewirausahaan. Mereka yang tidak sukses, tetap menjalani kegiatan sebagai petani atau buruh tani, serta berwirausaha. Program pemberdayaan belum menjadi prioritas pembangunan di desa dan masih diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Harapan mantan buruh migran adalah mendapat program pemberdayaan sesuai kebutuhan dan masalah yang dihadapi, serta berkesinambungan guna menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan di desa.

PEMBAHASAN

Motif Masyarakat Desa Menjadi Buruh Migran

Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang termasuk daerah yang menjadi pusat buruh migran terbesar di Kabupaten Cilacap, di mana di setiap rumah atau kepala keluarga terdapat mantan buruh migran. Berdasarkan kajian pendahuluan tahun 2015, dan hasil kajian lanjutan tahun 2016, motif masyarakat di dua desa tersebut menjadi buruh migran adalah karena tradisi turun temurun sejak 1990-an, khususnya dari pengalaman dan ajakan keluarga atau saudara, tetangga, dan teman yang sudah menjadi buruh migran lebih dulu. Selain faktor tradisi, motivasi masyarakat terbentuk karena kuatnya tawaran dari para penyalur tenaga kerja (yayasan swasta) yang datang langsung ke desa, di mana pemerintah desa cenderung membiarkan dan justru mendukung supaya masyarakatnya mendapat pekerjaan dan penghasilan besar.

Masyarakat di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat menjadi buruh migran yang sukses, karena dapat menghasilkan pendapatan dan tabungan yang lebih besar dibandingkan menjadi petani, peternak, pedagang, serta buruh di Indonesia. Buruh migran yang sukses umumnya memiliki dua orientasi, menjadi konsumtif, di mana tabungannya dihabiskan untuk membeli tanah, rumah, kendaraan, dan berbelanja yang melebihi kebutuhannya, atau menjadi produktif, di mana tabungannya dipergunakan untuk investasi usaha, seperti membeli sawah, ladang, kebun, modal usaha berternak, dan berdagang.

Masyarakat memiliki minat atau keinginan yang tinggi untuk menjadi buruh migran yang sukses walaupun banyak pengalaman mantan buruh migran yang gagal. Peristiwa-peristiwa seperti buruh migran yang tertipu jumlah upah dan profesi pekerjaan dari yang dijanjikan oleh penyalur dan majikan, kasus status buruh migran yang ilegal supaya lebih murah proses pengurusan administrasi perizinan, lebih kecil potongan upahnya oleh penyalur dan lebih tidak terikat jika tidak betah, sehingga bisa beralih profesi lain, tetap tak menyurutkan minat masyarakat yang tinggi.

Tingginya minat dan jumlah buruh migran dikarenakan pekerjaan yang tersedia di daerah tempat tinggal dinilai tidak cepat dan lebih besar untuk mendapat keuntungan dan kesejahteraan, dibandingkan dengan menjadi buruh migran di luar negeri. Menurut de Haan dan Rogaly (2010, h. 1), mobilitas buruh dipengaruhi oleh perubahan daerah dan desa yang spesifik dan kompleks untuk memenuhi tuntutan kepentingan modal dan kebutuhan tenaga kerja. Sulistiyo dan Wahyuni (2014, h. 253) menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di daerah asal dan daerah tujuan. Faktor-faktor yang ada di daerah asal menjadi faktor pendorong, sedangkan faktor-faktor yang ada di daerah tujuan merupakan faktor penarik.

Sementara, mantan buruh migran yang tidak berminat lagi untuk menjadi buruh migran umumnya karena merasa rugi, tidak mendapat upah, profesi, dan tempat kerja yang sesuai harapan atau yang dijanjikan, serta mendapat perlakuan yang tidak semestinya.

Mantan buruh migran yang memiliki pengalaman tidak sukses pada akhirnya berkeinginan untuk bekerja di desanya dengan menjadi petani yang memiliki sawah dan ladang sendiri, beternak, serta berdagang.

Permasalahan buruh migran di desa, menurut Prihatinah, Asyik & Kartono (2012, h. 317-318), sudah muncul sejak mengurus perizinan administrasi, seperti pemalsuan dan perubahan data dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang disebabkan mental dan kultur oknum aparat birokrasi. Kemudian, jika tidak lolos persyaratan membuat paspor untuk menjadi buruh migran, lantas akan dibuatkan paspor wisata. Terkait hal ini, Forde dan MacKenzie (2009, h. 437) menyatakan pentingnya membuat analisis strategi manajemen sumber daya manusia untuk penyalur dan pengusaha dalam mengetahui kebutuhan pekerja dan mengembangkan pemahaman pentingnya pengalaman sosial dan ekonomi para pekerja migran.

Paparan di atas menunjukkan bahwa motif masyarakat di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang menjadi buruh migran adalah ingin meniru kesuksesan, pengalaman, dan meraih pendapatan yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga, tanah, rumah, dan tabungan modal usaha di desa. Tetapi pekerjaan sebagai buruh migran bukan menjadi profesi yang direncanakan untuk jangka panjang secara terus menerus. Masyarakat hanya memiliki target mendapat tabungan yang dinyatakan cukup antara tiga sampai lima tahun.

Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Pembangunan dengan semangat “Bali Deso Bangun Deso” dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan lebih terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan bersama pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, serta anggaran pembangunan. Namun, dalam realitanya masih terdapat tantangan dan permasalahan, terutama terkait kesadaran, keinginan, serta kemampuan masyarakat dan pemerintah desa, untuk dapat menciptakan pembangunan yang partisipatif dan setara dalam membuka peluang kerja dan usaha, memberdayakan potensi masyarakat, lingkungan, serta ekonomi di desa.

Realitasnya, peran mantan dan calon buruh migran dalam pembangunan di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang umumnya didominasi laki-laki yang memiliki kesempatan, keberanian, dan kemampuan untuk beraspirasi mengemukakan pendapat (opini) dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam proses keputusan serta pelaksanaan pembangunan di desa. Kalangan perempuan cenderung mengalah, pasrah (*nerimo*) dan pasif, termarginalisasi, dan kurang berani beraspirasi. Menurut Sofiani (2009, h. 63-64) partisipasi perempuan dalam pembangunan hanya bisa diwujudkan jika perempuan diposisikan sebagai pelaku atau subjek dalam pembangunan. Namun kondisi perempuan yang rendah dalam bidang pendidikan, ditambah budaya yang

tidak berpihak, dan bias gender, menjadikan perempuan tersudut dalam posisi yang rentan. Perempuan dalam pembangunan masih termarginalisasi, ter subordinasi, berbeban ganda, serta mengalami stereotip dan kekerasan. Dhak (2014, h. 486) menegaskan bahwa kesetaraan dan pemberdayaan perempuan adalah faktor paling penting untuk mencapai tujuan dan pembuatan kebijakan.

Selain itu, masyarakat mantan buruh migran jarang yang menginvestasikan tabungannya untuk pendidikan anak dan keluarga ke jenjang yang lebih tinggi, supaya dapat mengubah atau meningkatkan orientasi dalam mencari pekerjaan. Mantan buruh migran yang sukses umumnya menggunakan uangnya untuk membeli tanah dan rumah, sawah, ladang dan kebun, membuka usaha seperti jualan warung kelontong, beternak ayam, kambing, dan sapi di desa. Tetapi ada juga yang konsumtif, menggunakan tabungannya untuk hidup boros dan tidak melakukan kegiatan produktif usaha ekonomi. Ini karena umumnya buruh migran memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang mendapatkan pemberdayaan ekonomi di desa secara terprogram dan berkesinambungan. Sementara, kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang ada masih bersifat individual dan kelompok kecil, tidak dalam bentuk komunitas usaha yang menyatukan berbagai kelompok dalam satu kesatuan untuk bekerjasama saling mendukung dan menguatkan. Di satu sisi masyarakat sebenarnya memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan usaha

ekonomi. Tetapi di sisi lain tidak memiliki keberanian dan kesempatan untuk ikut mengusulkan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah desa tampak kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ber aspirasi dalam menentukan perumusan program dan anggaran pembangunan desa. Aspirasi dan proses pembuatan keputusan umumnya diwakili oleh perangkat RW, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan perangkat lain tanpa memerhatikan aspirasi masyarakat.

Akibatnya, pemerintah desa belum juga membuat program yang mampu membuka lapangan kerja dan mengembangkan potensi desa, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta mengubah orientasi menjadi buruh migran yang dianggap sebagai profesi paling menjamin kesejahteraan. Connell dan Budgess (2009) menyatakan bahwa daya tarik menjadi buruh migran adalah untuk mencari penghidupan di negara yang memiliki ekonomi tinggi. Namun, hal itu ada konsekuensinya, yaitu dengan memberikan penguatan organisasi dan kebijakan yang mendukung kebutuhan buruh migran. Menurut de Haan dan Rogaly (2010) kebijakan publik diperlukan untuk mendukung para buruh migran, yaitu membuat prosedur migrasi lebih murah, aman, dan mengurangi diskriminasi, meningkatkan akses perawatan kesehatan, serta pelayanan-pelayanan lainnya. Pemerintah desa memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk menentukan semua program dan anggaran pembangunan guna mewujudkan hal itu. Tetapi kalau tanpa

memberikan kesempatan secara terbuka bagi keterlibatan masyarakat, hal itu akan mengakibatkan kultur yang kurang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sisk (2002, h. 188) menegaskan, bahwa pembangunan berkesinambungan hanya dapat dilaksanakan bilamana pemerintahan lokal diberdayakan untuk memainkan peran maksimalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi, dalam tata cara yang sejalan dengan hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat yang kolaboratif dalam pengambilan kebijakan.

Masyarakat yang tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, mengusulkan program pembangunan dan pemberdayaan desa, mengakibatkan kontrol kepada pemerintah desa untuk memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat beserta penggunaan anggarannya sebagai program pembangunan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak dapat terwujud. Padahal menurut Susantyo (2007, h.15), partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya peluang atau kesempatan untuk memengaruhi jalannya kebijakan pembangunan dan mengusulkan perbaikan nasib. Begitupun pendapat Dinata dan Adi (2014, h. 993-994), dalam pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa. Semua program pembangunan yang dibuat harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam perencanaan program

pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat desa secara optimal.

Pada situasi seperti itu, pemerintah desa pun tidak berdaya mengatasi tawaran penyalur tenaga kerja yang gencar ke masyarakat. Alih-alih, justru mendukung masyarakatnya menjadi buruh migran ke luar negeri karena menganggap hal itu sebagai solusi paling tepat dan prospektif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, buruh migran tidak memiliki daya tawar dan perlindungan hukum yang memadai terhadap penyalur untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang sesuai berdasarkan perjanjian.

Lembaga-lembaga sosial, baik yayasan, pesantren, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan pun tidak aktif memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan tentang buruh migran, baik dari segi pengetahuan hukum, peningkatan keahlian, advokasi atau perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi. Idealnya, menurut Connell dan Budgess (2009, h. 412), terdapat peran dari lembaga buruh sebagai mediator atau fasilitator antara perusahaan dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan program pelatihan budaya kerja, menciptakan buruh migran yang profesional, dan adanya dukungan kebijakan memperluas pasar tenaga kerja.

Rekomendasi hasil riset dari *Asian Migrant Centre (AMC)*, *Indonesian Migrant Workers Union (IMWU)*, *The Hong Kong Coalition of Indonesian Migrant Workers Organization (KOTKIHO)* tahun 2007 di antaranya menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya menghentikan praktik meluas dari agen-agen tenaga kerja di Indonesia yang

telah menempatkan buruh migran dalam kondisi di bawah jeratan hutang melalui mekanisme penilaian atas biaya-biaya agen yang berlebihan. Pemerintah juga harus mulai mengawasi dengan ketat ketaatan pelaku rekrutmen dan agen penempatan dengan menggunakan peraturan standar hak-hak asasi manusia internasional. Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap agen tenaga kerja yang melanggar peraturan-peraturan, termasuk mencabut izin usaha dan melarang agen memulai usaha baru sebagai langkah pencegahan yang penting atas praktik eksploitasi terhadap buruh migran. Menurut Constant, Krause, Rinne & Zimmermann (2011, h. 825) terdapat implikasi dari banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan buruh migran, sehingga diperlukan kebijakan dan monitor untuk mengantisipasi risiko yang didapatkan para pencari kerja.

Tetapi Marlina (2013, h. 191) menyatakan bahwa peraturan penempatan dan perlindungan tenaga kerja masih cenderung hanya mengatur prosedur, bukan melakukan upaya mengurangi jumlah buruh migran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus meninggalkan negara dan keluarganya. Pengalaman para buruh migran, khususnya yang berorientasi produktif, memperlihatkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha tani dan ternak karena kurangnya dukungan pengetahuan, kemampuan, akses modal usaha, pupuk, dan pemasaran. Alih-alih memperoleh keuntungan, mereka justru banyak yang mengalami kebangkrutan. Tentang hal ini

Sulistiyo dan Wahyuni (2014, h. 257) berpendapat bahwa buruh migran pada umumnya belum dapat memanfaatkan remitan sebagai modal usaha, sehingga pemerintah desa maupun jajaran yang lebih tinggi, LSM, dan lembaga lainnya perlu membuat program pendampingan buruh migran dalam memanfaatkan remitan sebagai investasi dan diversifikasi usaha di pedesaan. Bila ini dilakukan, jumlah buruh migran bisa ditekan tiap tahunnya.

Dampak kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti yang tergambarkan itu berawal dari lemahnya fungsi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa. Pemerintah desa sendiri belum memanfaatkan forum tersebut dalam menyusun perencanaan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber dana dari Alokasi Anggaran Desa (ADD) supaya tercipta lapangan kerja atau usaha ekonomi di desa. Padahal, LRC-KJHAM pada tahun 2010 telah memberikan rekomendasi, berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menjadi buruh migran (mantan atau calon) untuk dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dengan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Di sini terlihat dengan jelas bahwa komunikasi pembangunan di desa, antara masyarakat dan pemerintah desa, belum partisipatif. Transparansi dan akuntabilitas

program dan anggaran pembangunan desa menjadi tak terwujud dengan baik. Sehingga, *monitoring* dan evaluasi anggaran pembangunan desa menjadi hanya bersifat formalitas. Program pemberdayaan yang selama ini diberikan pada masyarakat desa masih bersifat *top down*, di mana inisiatif datang dari program dinas kabupaten dengan pola pemrograman yang tidak berkesinambungan. Pemerintah desa sendiri bersikap pasif dalam membuat serta menganggarkan program pemberdayaan masyarakat desa. Ini mendorong masyarakat untuk merantau dan menjadi buruh migran sebagai profesi yang dianggap paling menjanjikan, walaupun banyak persoalan yang terjadi.

Maka diperlukan model komunikasi partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat dan dalam upaya *monitoring* serta evaluasi pembangunan di desa. Sebagaimana dinyatakan oleh Theodore, Valenzuela & Meléndez (2009, h. 422), kondisi ketidakstabilan dan pelanggaran standar dasar perburuhan dapat diintervensi dengan membuat model yang dapat diterapkan bahkan untuk konteks lainnya. Perlu ada *political will* yang konkrit untuk mendorong praktik kebijakan yang mengundang partisipasi masyarakat secara riil. Choi (2014, h. 15) menegaskan bahwa dalam sistem penganggaran yang partisipatif, masyarakat tidak hanya dapat menuntut perluasan peran serta tetapi juga kualitas partisipasi yang bertujuan memperkuat kemampuan partisipasi masyarakat dengan cara pengambilan peran secara setara antara pemerintah dan masyarakat.

Strategi Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pemberdayaan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan dapat menggunakan analisis SWOT (Dyson, 2004, h. 632; Valentin, 2005, h. 91-92; Rangkuti, 2006, h. 33-35; Adisasminta, 2006, h. 89-90). Analisis SWOT yaitu (1) Analisis faktor internal, yang terdiri dari *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), (2) Analisis faktor eksternal, terdiri dari *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman). Analisis SWOT digunakan untuk membuat strategi komunikasi pembangunan partisipatif dalam pembangunan desa, khususnya program pemberdayaan bagi mantan dan calon buruh migran (Tabel 3).

Menurut Rangkuti (2006, h. 8) strategi merupakan tindakan atau kegiatan yang dirancang dengan baik, supaya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Effendy (2008, h. 32) menjelaskan strategi sebagai perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan dengan cara yang dapat dimengerti, diterima, dan ada motivasi untuk melaksanakannya. Strategi yang di hasilkan yaitu (1) Strategi SO (*Strength* dan *Opportunity*), menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, (2) Strategi ST (*Strength* dan *Threat*), menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman, (3) Strategi WO (*Weakness* dan *Opportunity*), memanfaatkan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, dan (4) Strategi WT (*Weakness* dan *Threat*), kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 3 Analisis SWOT dan Strategi Komunikasi Pembangunan Partisipatif di Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang, Kabupaten Cilacap

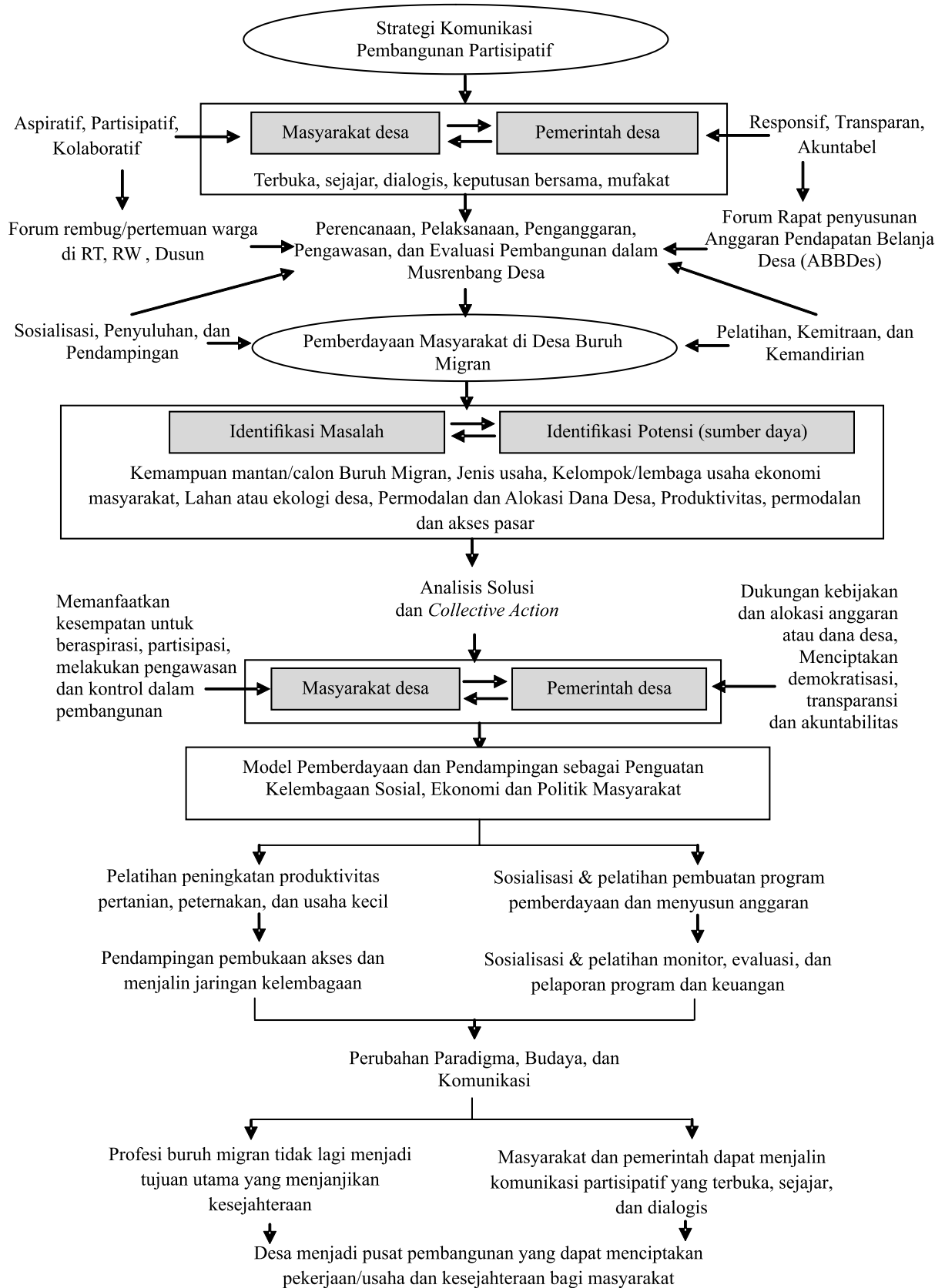
Internal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat (calon dan mantan buruh migran) memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja keras 2. Masyarakat memiliki kemampuan dan potensi dalam proses pembangunan desa bidang pertanian, peternakan kambing, sapi, dan perikanan 3. Masyarakat memiliki keinginan dan harapan besar memperoleh pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. 4. Masyarakat memiliki ikatan yang kuat untuk tinggal, bekerja, dan memajukan desa 5. Masyarakat memiliki kepedulian untuk membangun desanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat (calon dan mantan buruh migran) memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki daya tawar dan selalu terbujuj menjadi buruh migran dengan profesi dan penghasilan yang tidak sesuai harapan, serta kemampuan yang terbatas mengelola usaha di desa. 2. Masyarakat desa kurang memiliki keberanian beraspirasi terhadap pemerintah desa untuk mengusulkan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 3. Masyarakat tidak melakukan kerja sama membentuk lembaga ekonomi di desa 4. Masyarakat dalam menginvestasikan tabungan lebih bersifat konsumtif daripada produktif
Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Musrenbang di tingkat dusun dan desa menjadi forum yang memberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan partisipatif 2. Anggaran pembangunan cukup besar seperti dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 3. Pelaksanaan program pemberdayaan dari kabupaten dapat diaspirasikan secara berkesinambungan 4. Perkembangan media massa membantu dalam transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pembangunan di desa 	<p>Pemerintah Kabupaten Cilacap, perguruan tinggi, dan media/jurnalis melakukan komunikasi partisipatif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan pada masyarakat dalam forum rembung desa atau musyawarah desa untuk dapat beraspirasi secara terbuka, sejajar, dan mufakat dalam mengembangkan potensi, minat, kebutuhan, harapan masyarakat untuk pembangunan desa dan pemberdayaan di berbagai bidang. 2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat supaya membangun mental, motivasi, serta kesadaran hak dan kewajiban membangun desa, pentingnya beraspirasi, bermusyawarah, serta membuat keputusan bersama dalam proses pembangunan di desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat memanfaatkan forum komunikasi rembung atau musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) yang diselenggarakan setiap bulan dan tiga bulanan, termasuk di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) secara terbuka dan partisipatif untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di desa. 2. Masyarakat dapat memperkuat kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik dengan media massa, melakukan dialog atau komunikasi dengan pemerintah desa dalam mengalokasikan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa, pemberdayaan, dan lebih memberikan kesejahteraan bagi desa.
Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa masih elitis dan kurang demokratis untuk memberikan kesempatan beraspirasi serta kurang transparan dalam pelaksanaan program pembangunan dan alokasi anggaran 2. Pihak penyalur tenaga kerja memiliki kekuatan untuk membujuk masyarakat menjadi buruh migran dan kurang terkontrol dalam proses penyaluran serta pemulangannya. 3. Pemerintah desa kurang memiliki inisiatif untuk membuat program pemberdayaan dan alokasi anggarannya, hanya menunggu dari pihak kabupaten. 	<p>Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat membuat kegiatan komunikasi pemberdayaan secara partisipatif, yaitu penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Musrenbang desa untuk mengidentifikasi masalah, potensi, merancang program pemberdayaan, serta anggarannya 2. Pengetahuan dan advokasi hukum bagi calon buruh migran sesuai UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan & UU No. 39/2004 Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 3. Pengembangan dan penguatan lembaga ekonomi, sosial, dan politik sebagai penyeimbang kekuasaan dan kontrol di desa. 	<p>Perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat melakukan komunikasi pembangunan pada masyarakat dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya meningkatkan pendidikan anak-anak/generasi muda yang harus diperhatikan keluarga 2. Penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan administrasi, pembuatan program pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, pengawasan, serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pembangunan di desa kepada ketua dan pengurus RT, RW, Karang Taruna, kelompok/lembaga wanita di desa.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di Tabel 3 tersebut ditemukan bahwa komunikasi pembangunan antara masyarakat dengan pemerintah desa belum partisipatif. Masyarakat dan pemerintah desa masih memiliki budaya patrimonial dengan memosisikan pemerintah desa sebagai atasan, penguasa yang mendominasi keputusan membuat program pembangunan, anggaran, dan pelaksanaannya. Pihak masyarakat berposisi sebagai bawahan yang tidak sejajar, harus menuruti dan pasrah menerima keputusan yang diberikan pemerintah desa. Demokratisasi di desa belum terwujud, seperti kurang adanya kesempatan untuk beraspirasi, berpartisipasi, tidak ada keterbukaan atau transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa. Menurut Wahyuni (2012, h. 80-81) pola komunikasi linear (searah) cenderung tidak efektif untuk mengembangkan prasyarat partisipasi (kesempatan, kemampuan, dan kemauan) warga desa. Akibatnya, partisipasi masyarakat rendah karena program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui proses komunikasi yang lebih interaktif dan konvergen. Pemerintah perlu menetapkan pendekatan partisipatif yang bertumpu pada kelompok masyarakat, dan perlu mengubah paradigma komunikasi *top-down* ke *bottom-up*.

Pemerintah desa belum memiliki inisiatif untuk membuat program pemberdayaan bagi masyarakat. Selama ini program datang dari dinas pemerintah kabupaten. Program pemberdayaan yang dilakukan tidak secara partisipatif melibatkan masyarakat sesuai

permasalahan yang dihadapi, kebutuhan, potensi sumber daya masyarakat, budaya, serta ekonomi di desa. Program pemberdayaan yang dilakukan atas inisiatif pemerintah daerah tersebut tidak pula berjalan secara berkesinambungan. Eksekusi program umumnya hanya di tahap penyuluhan dan pelatihan, dan tidak dilanjutkan dengan program pendampingan, *monitoring* dan evaluasi, serta kemitraan untuk membantu peningkatan jaringan kelembagaan dan pemasaran hasil. Dampaknya, usaha ekonomi masyarakat desa tidak memiliki kekuatan baik dari segi pengembangan produksi, kelembagaan, dan keberlanjutan. Pemerintah desa dan masyarakat tetap tidak berdaya atas tawaran lembaga penyalur tenaga kerja, menjadikan profesi buruh migran sebagai solusi paling utama dan paling menjanjikan untuk mencari penghasilan serta mendapat kesejahteraan. Pada tahun 2010, LRC-KJHAM telah memberikan rekomendasi supaya pemerintah kabupaten dan provinsi membuat peraturan yang melindungi buruh migran, karena peraturan yang ada selama ini kurang melindungi dan hanya menjadi aturan untuk penempatan kerja.

Sesuai analisis SWOT, peran masyarakat dan pemerintah desa perlu diwujudkan melalui strategi komunikasi pembangunan yang partisipatif, yaitu bersifat terbuka, sejajar, dialogis, menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Untuk itu, masyarakat desa perlu memiliki karakter aspiratif dengan memberikan masukan atau kritikan, aktif terlibat dalam segala kegiatan pembangunan di desa, dan kolaboratif antarmasyarakat maupun antarlembaga masyarakat.



Gambar 1 Strategi Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pemberdayaan Mantan dan Calon Buruh Migran di Desa

Sedangkan pemerintah desa perlu memiliki karakter responsif (cepat tanggap dan peduli pada masukan, kritikan, dan masalah yang ada), transparan (menerima saran, kritik, dan dalam pengalokasian anggaran pembangunan), dan akuntabel (dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan kepada publik). Muchtar (2016, h. 30) menyatakan komunikasi partisipatif merupakan salah satu pendekatan guna mewujudkan tujuan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat untuk mengaspirasikan kebutuhan dengan dukungan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam program pembangunan.

Komunikasi partisipatif dalam pembangunan, menurut Mahmud (2007, h. 119), perlu diterapkan secara persuasif, dialogis, dan deliberatif dengan memberi peluang bagi keikutsertaan publik dalam membentuk forum lokal, terutama lembaga keagamaan, untuk dijadikan sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi di desa. Hal itu karena keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas, dan kohesivitas dianggap lebih fleksibel. Semua pihak diundang untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan pengambilan keputusan (Satriani, Muljono & Lumintang, 2011, h. 17). Untuk mendukung hal itu, komunikasi perlu dilaksanakan dalam model horisontal, di mana interaksi diwujudkan secara demokratis serta mengutamakan *sharing* dan dialog, lebih dari sekadar memberi dan menerima.

Strategi komunikasi partisipatif seperti itu sangat memungkinkan untuk diimplementasikan oleh masyarakat dalam

forum rembug atau pertemuan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan dusun, forum rapat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ataupun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa untuk perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di desa. Strategi tersebut dirancang dan dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya para mantan dan calon buruh migran di desa, melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, kemitraan, dan kemandirian. Pemberdayaan itu sendiri merupakan hasil dari proses pengidentifikasian atas masalah, potensi sumber daya manusia, ekonomi, budaya, dan lingkungan, yang dianalisis untuk memperoleh solusi serta penetapan program yang dibutuhkan. Rancangan strategi komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat calon dan mantan buruh migran dapat dilihat pada Gambar 1.

SIMPULAN

Masyarakat dan pemerintah Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang belum menjalin komunikasi partisipatif dalam proses pembangunan. Indikasinya yaitu kurang adanya kesempatan secara terbuka untuk beraspirasi dan partisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat juga belum dirumuskan dalam perencanaan program pembangunan

di desa serta masih bersifat *top down* karena inisiatif dan penganggarannya datang dari dinas pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, bukan dari aspirasi masyarakat dan pemerintah desa secara partisipatif (*bottom up*).

Pemerintah desa tidak memiliki inisiatif untuk membuat rencana program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dampaknya, masyarakat dan pemerintah Desa Sidaurip dan Desa Karangtawang masih menilai profesi menjadi buruh migran adalah solusi paling menjanjikan dan prospektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat buruh migran, mantan dan calon, memiliki potensi melakukan usaha pertanian, perkebunan, peternakan kambing dan sapi, serta perikanan, namun masih bersifat individual dan kelompok kecil. Mereka belum memiliki kesadaran membentuk kelompok usaha bersama untuk mengembangkan dan memperkuat kelembagaan serta memiliki kekuatan mengusulkan program pemberdayaan seperti penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan secara berkesinambungan kepada pemerintah desa.

Masyarakat dan pemerintah desa harus mendapat sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat tentang mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa, pembuatan program pembangunan, penggunaan

dan pelaporan anggaran, serta evaluasi pembangunan berdasarkan identifikasi masalah, analisis potensi sumber daya, dan program pemberdayaan. Masyarakat dan pemerintah desa dapat memanfaatkan forum pertemuan dari tingkat RT, RW, dusun, dan desa untuk menciptakan komunikasi partisipatif dalam proses pembangunan yang melibatkan semua pihak, terbuka, sejajar, dialogis, dan menghasilkan kesepakatan bersama dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan desa. Pemerintah desa harus memiliki keseriusan dalam membuat kebijakan pembangunan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat betah tinggal di desa, mendapat pekerjaan atau usaha ekonomi, memiliki pendapatan dan sejahtera, sehingga tidak meninggalkan desanya untuk merantau dan menjadi buruh migran.

Pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerjasama melakukan identifikasi masalah, pemetaan potensi sumber daya alam, manusia, budaya, dan ekonomi desa untuk dijadikan modal pembangunan, membuat program pemberdayaan guna membuka lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Mereka juga dapat bekerjasama dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang buruh migran yang profesional dan legal sehingga memiliki pengetahuan, keahlian, pekerjaan dan upah yang sesuai, serta mendapat perlindungan atau pembelaan hukum. Pada gilirannya dapat mengembangkan dan memperkuat lembaga ekonomi, sosial, dan

politik di masyarakat, supaya memiliki kekuatan untuk beraspirasi, berpartisipasi, melakukan kontrol atau pengawasan, dan evaluasi kepada pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan di desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, I.R. (2013) *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat: sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu
- Asian Migrant Centre (AMC), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), The Hong Kong Coalition of Indonesian Migrant Workers Organization (KOTKIHO). (2007). *Underpayment 2, Pemerasan sistematis berkepanjangan pada buruh migran Indonesia di Hong Kong: Suatu studi mendalam*. <http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_116887/lang-en/index.htm>
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). (2015). *Data migran Se-Indonesia*. <<http://www.bnp2tki.go.id>>
- Choi I. (2014). What explains the success of participatory budgeting? Evidence from Seoul autonomous districts. *Journal of Public Deliberation*, 10(9), 1-19
- Constant, A.F., Krause, A., Rinne, U., & Zimmermann, K.F. (2011) Economic preferences and attitudes of the unemployed: Are natives and second generation migrants alike?. *International Journal of Manpower*, 32(7), 825-851
- Connell, J., & Budgess, J. (2009). Migrant workers, migrant work, public policy and human resource management. *International Journal of Manpower*, 30(5), 412-421
- de Haan, A., & Rogaly, B. (2010). Introduction: Migrant workers and their role in rural change. *Journal of Development Studies*. 38(5), 1-14
- Dhak, B. (2014). Food security act, 2013: Opportunities and challenges for the Backward States in India. *Journal of Rural Development*, 33(4), 475-491
- Dinata, S.A., & Adi, A.S. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Ngingasrembyong kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(2), 992-1011
- DPR. (2015). *Refleksi perlindungan buruh migran minim*. <<http://www.dpr.go.id>>
- Dyson, R.G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the university of warwick. *European Journal of Operational Research*, 152, 631-640
- Effendy, O.U. (2008). *Dinamika komunikasi*. Bandung, Indonesia: Rosdakarya
- Forde, C., & MacKenzie, R. (2009). Employers' use of low-skilled migrant workers: Assessing the implications for human resource management. *International Journal of Manpower*, 30(5), 437-452
- Hanuranto, A.T. (2011). Peningkatan akses dan kompetensi teleinformatika (ICT) bagi petani dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian nasional. *Prosiding. Seminar Nasional Informatika Pertanian 2011. Akselerasi pembangunan informatika pertanian dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani 2011. Himpunan Informatika Pertanian. (h.1-5). Universitas Padjadjaran 21-22 Oktober 2011, Bandung, Indonesia*
- Indardi. (2016). Pengembangan model komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat tani. *Jurnal Agraris*, 2(1), 75-86
- Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). (2010). *Keterkaitan migrasi labour-trafficking & gender: Laporan pelaksanaan feminist participatory action research (FPAR) di Desa Rowoberanten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia*. <http://www.gaatw.org/FPAR_Series/LRC-KJHAM_Laporan_FPAR_Bahasa.pdf>

- Mahmud, A. (2007). *Model komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana perdesaan di kawasan pesisir utara jawa tengah: Studi kasus desa morodemak dan purwosari kabupaten demak*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
- Marlina. (2013). Perlindungan hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional. *Pandecta*, 8(12), 182-195
- Melkote, S.R. (1991). *Communication for development in third world*. New Delhi, India: Sage Publications
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2007). *Analisis data kualitatif*. Rohidi T.R, penerjemah. Jakarta, Indonesia: UI Press
- Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Jurnal Makna*. 1(1), 20-32
- Mulyana, D. (2007). Membangun komunikasi pembangunan yang humanistik. Dalam Dilla. S. *Komunikasi pembangunan: Pendekatan terpadu*. Bandung, Indonesia: Simbiosia Rekatama Media
- Prihatinah, T.L., Asyik, N., & Kartono. (2012). Kendala perlindungan hukum terhadap buruh migran di kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 312-320
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus Bisnis*. Jakarta, Indonesia: Gramedia
- Rangkuti P.A. (2011). *Komunikasi pembangunan dan mekanisasi pertanian*. Bogor, Indonesia: IPB Pers
- Rogers, E.M. (1985). *Perspektif baru dalam komunikasi dan pembangunan: Suatu tinjauan dalam komunikasi dan pembangunan perspektif kritis*. Dasmal N, penerjemah. Jakarta, Indonesia: LP3ES
- Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R.W.E. (2011). Komunikasi partisipatif pada program pos pemberdayaan keluarga: Studi kasus di RW 05 kelurahan Situgede, kecamatan Bogor Barat, kota Bogor. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 9(2), 17-27
- Sisk, T.D. (2002). *Demokrasi di tingkat lokal*. Buku panduan internasional IDEA mengenai keterlibatan, keterwakilan, pengelolaan konflik dan pemerintahan. Stockholm, Sweden: Publication Office, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- Sofiani. T. (2009). Membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan. *Muwazah*. 1(1), 63-72
- Subianto, A. (2006). *Pengaruh pemanfaatan remitan buruh migran terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di kabupaten Cilacap: Studi kasus di kecamatan Adipala, kecamatan Binangun dan kecamatan Nusawungu*. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
- Sulistiyono, P.A., & Wahyuni, E.S. (2014). Dampak remitan ekonomi terhadap posisi sosial buruh migran perempuan rumah tangga. *Sodality (Jurnal Sosiologi Pedesaan)*, 6(03), 252-258
- Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Pandecta*. 9(2), 253-268
- Sutaat., Setiti, S.G., Widodo, N., & Unayah, N. (2011). *Pendampingan sosial bagi calon pekerja migran dan keluarganya di daerah asal*. Jakarta, Indonesia: P3KS Press
- Susantyo, B. (2007). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Telaah atas tulisan David C. Korten. *Informasi*, 12(3), 14-21
- Syahyuti. (2006). *Tiga puluh konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian*. Jakarta, Indonesia: Bina Rena Pariwisata
- Theodore, N., Valenzuela, Jr, A., & Meléndez, E. (2009). Worker centers: Defending labor standards for migrant workers in the informal economy. *International Journal of Manpower*, 30(5), 422-436
- Valentin, E.K. (2005). Away With SWOT Analysis: Use defensive or offensive evaluation instead. *The Journal of Applied Business Research*, 21(2), 91-105
- Wahyuni, S. (2012). *Proses komunikasi dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat desa: Kasus program raksa desa di kecamatan Ciampea kabupaten Bogor*. Tesis. IPB Bogor, Indonesia